

BAB

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN**



**RENSTRA
KECAMATAN
TLOGOWUNGU
KABUPATEN PATI**

BAB II

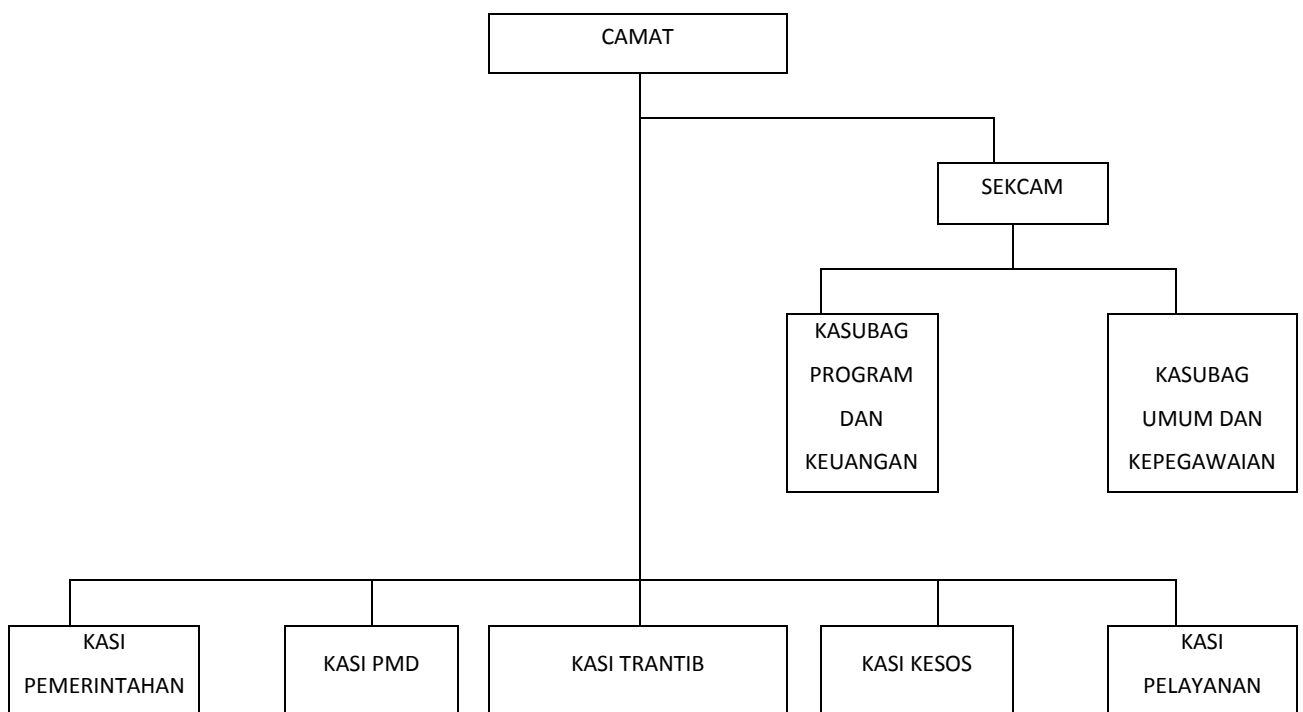
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Tlogowungu terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KANTOR KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi

		<p>anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</p>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara,

	<p>bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	--

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tambakromo berjumlah 15 orang, Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana able di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tlogowungu	2		5		5	4	16	
	- Camat	1							
	- Sekcam	1							
	- Kasubag Program & Keu				1				
	- Kasubag Umum & Kepeg				1				
	- Kasi PMD			1					
	- Kasi Trantib			1					
	- Kasi Kesos			1					
	- Kasi Pelayanan				1				
	- Kasi Pemerintahan				1				
	- Staf Pemerintahan					1			
	- Staf Subbag Program & Keu						2		
	- Staf Pelayanan						2		
	- Staf Kesos					1			
	- Satpol PP					3			

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2016

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT		SLTA		Diplo		S1		S2<		Jumla	
		P				ma						h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	1		4	3	1		6		1		12	4
	- Camat							1					
	- Sekcam									1			
	-Kasubag Program & Keu							1					
	-Kasubag Umum & Kepeg							1					
	- Kasi PMD							1					
	- Kasi Trantib							1					
	- Kasi Kesos							1					
	-Kasi Pelayanan								1				
	-Kasi Pemerintahan								1				
	-Staf PMD												
	-Staf Program & Keu				2								
	-Staf Kesos				1								
	-Staf Pemerintahan	1											
	-Staf Pelayanan				2								
	- Satpol PP				3								

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2016

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan TLOGOWUNGU	2	-	4	4	-	2	6	2	12	4
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Satpol PP	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan TLOGOWUNGU, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	7	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	5	unit		
		5	unit	5 Baik	
		0	unit	Kurang Baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	7	unit	6 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	3	unit	2 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	7	unit	5 baik, 2 kurang baik,	
8	- Meja	18	unit	18 baik, kurang baik	
9	- Kursi	126	unit	126 baik, kurang baik	
10	- AC	3	unit	3 baik	
11	- Almari	11	unit	11 baik, kurang baik	
12	- Filling cabinet	10	Unit	10 baik, kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2016

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang dari satpol PP sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 6 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 6 unit dikarenakan 5 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 1 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 7 unit dengan 6 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 1 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 18 unit dengan 18 dalam kondisi baik dan kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 126 unit dengan 126 dalam kondisi baik dan kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 12 unit lagi untuk pelayanan dan rapat serta penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 3 unit lagi untuk 3 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 11 unit dengan 11 dalam kondisi baik dan kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 10 unit dengan 10 dalam kondisi baik dan kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Tlogowungu

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tambakromo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 67.247 Ha. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo
- Bagian Utara : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Gembong Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Tlogowungu

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.7

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Tlogowungu

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Tamansari	586	12	3	

2	Tlogorejo	949	32	5	
3	Purwosari	622	9	3	
4	Guwo	546	33	5	
5	Sambirejo	456	25	4	
6	Wonorejo	498	6	2	
7	Regaloh	300	26	4	
8	Sumbermulyo	194	12	5	
9	Tlogosari	462	9	2	
10	Lahar	434	16	3	
11	Suwatu	334	18	3	
12	Cabak	465	22	6	
13	Tajungsari	246	17	2	
14	Gunungsari	256	21	3	
15	Klumpit	186	11	2	

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.317 jiwa, yang terdiri dari 23.719 jiwa laki-laki dan 25.598 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Tlogowungu tahun 2016 berjumlah 17.136 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 681 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Tlogowungu digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tlogowungu

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.838	53,91	1.571	46,08	3.409	100
2	5-9	1.921	49,93	1.926	50,06	3.847	100
3	10-14	1.948	49,84	1959	50,12	3.908	100

4	15-19	1.772	49,53	1.805	50,46	3.577	100
5	20-24	1.631	45,49	1.954	54,50	3.585	100
6	25-29	1.539	45,96	1.809	54,03	3.348	100
7.	30-34	1.629	46,29	1.890	53,70	3.519	100
8	35-39	1.801	46,82	2.045	53,18	3.846	100
9	40-44	1.886	47,45	2.088	52,55	3.974	100
10	45-49	1.810	48,97	1.886	51,03	3.696	100
11	50-54	1.658	51,28	1.575	48,72	3.233	100
12	55-59	1.306	49,15	1.351	50,85	2.657	100
13	60-64	1.064	46,91	1.204	53,09	2.268	100
14	65-69	716	42,79	957	57,21	1.673	100
15	70-74	579	45,02	707	54,98	1.286	100
16	75+	620	41,58	871	58,42	1.491	100

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tlogowungu

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	6.020	6.051	12.071	22,71%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3.030	3.263	6.293	11,84%
3	Tamat SD / Sederajat	9.878	9.885	19.763	37,18%
4	SLTP/Sederajat	4.259	4.476	8.835	16,62%
5	SLTA/Sederajat	2.686	2.235	4.921	9,26%
6	Diploma I/II	67	123	190	0,36%
7	Akademi/DiplomaIII/Sarmud	127	204	331	0,62%
8	Diploma IV/Strata I	359	373	731	1,38%
9	Strata II	12	8	20	0,04%
10	Strata III	0	1	1	0,001%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.610	5.938	12.548	23,60%
2	Mengurus rumah tangga	7	5.268	5.275	9,88%
3	Pelajar/mahasiswa	3.129	2.733	5.862	11,02%
4	Pensiunan	95	39	134	0,25%
5	PNS	177	87	264	0,49%
6	TNI	35	0	35	0,06%
7	Polri	56	0	56	0,10%
8	Pedagang	123	136	259	0,48%
9	Petani/pekebun	5.322	5.536	10.858	20,42%
10	Peternak	3	0	3	0,005%
11	Nelayan	5	4	9	0,01%
12	Industri	6	2	8	0,015%
13	Konstruksi	1	0	1	0,001%
14	Transportasi	6	0	6	0,011%
15	Karyawan swasta	623	473	1.096	2,06%
16	Karyawan BUMN	34	3	37	0,06%
17	Karyawan BUMD	11	8	19	0,03%
18	Karyawan Honorer	32	38	70	0,13%
19	Buruh harian lepas	114	41	155	0,29%
20	Buruh tani	502	642	1.144	2,15%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1	0,001%
22	Buruh Peternakan	0	2	2	0,002%
23	Pembantu Rumah Tangga	0	12	12	0,022%
24	Tukang cukur	1	0	1	0,001%
25	Tukang listrik	5	0	5	0,009%
26	Tukang batu	109	1	110	0,20%
27	Tukang kayu	99	0	99	0,18%
28	Tukang las / pandai besi	21	0	21	0,03
29	Tukang jahit	12	37	49	0,09%
30	Penata rias	0	6	6	0,011%

31	Penata rambut	1	0	1	0,001%
32	Mekanik	12	0	12	0,022%
33	Seniman	6	1	7	0,013%
34	Tabib	1	0	1	0,001%
35	Imam mesjid	1	0	1	0,001%
36	Pendeta	3	0	3	0,005%
37	Wartawan	1	0	1	0,001%
38	Ustadz	6	1	7	0,013%
39	Juru masak	0	1	1	0,001%
40	Dosen	2	1	3	0,005%
41	Guru	124	205	329	0,61%
42	Pengacara	3	0	3	0,005%
43	Dokter	1	2	3	0,005%
44	Pelaut	5	0	5	0,009%
45	Sopir	113	0	113	0,21%
46	Pialang	1	0	1	0,001%
47	Paranormal	1	2	3	0,005%
48	Pedagang	203	293	496	0,93%
49	Perangkat Desa	160	12	172	0,32%
50	Kepala Desa	9	0	9	0,016%
51	Wiraswasta	8.727	5.010	13.737	25,84%
52	Lainnya	2	0	2	0,003%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tlogowungu

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	26.451	26.517	52.968	99,64%

2	Kristen	79	93	172	0,32%
3	Katolik	4	5	9	0,02%
4	Hindu	1	1	2	0,00%
5	Budha	0	0	0	0,00%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	3	3	6	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Tlogowungu didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus	na	na	na	0	0

	narkoba						
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0	
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	1	2	
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	2	2	
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	13	11	
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	1	1	
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0	
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	17	16	
9	Jumlah penduduk	na	na	na	49.317	49.574	
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	na	3,44	3,22	

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Tamansari	2	4	6
2	Tlogorejo	3	1	4
3	purwosari	2	1	3
4	Guwo	4	2	6
5	Sambirejo	2	1	3
6	Wonorejo	3	1	4

7	Regaloh	4	2	6
8	Sumbermulyo	2	1	3
9	Tlogosari	3	1	4
10	Lahar	4	2	6
11	Suwatu	3	2	5
12	Cabak	6	2	8
13	Tajungsari	4	2	6
14	Gunungsari	4	1	5
15	Klumpit	2	2	3
	Jumlah	48	24	72

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Tamansari	22	0	22
2	Tlogorejo	17	0	17
3	Purwosari	22	0	22
4	Guwo	23	0	23
5	Sambirejo	23	0	23
6	Wonorejo	20	0	20
7	Regaloh	22	0	22
8	Sumbermulyo	19	0	19
9	Tlogosari	22	0	22
10	Lahar	23	0	23
11	Suwatu	23	0	23
12	Cabak	27	0	27
13	Tajungsari	23	0	23
14	Gunungsari	23	0	23
15	Klumpit	12	0	12
	Jumlah	321	0	321

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Tlogowungu periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TLOGOWUNGU
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6,0	5,8	5,5	5,4	4,8	6,2	5,95	5,76	5,53	4,84	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		60		46	50	54	57	60	44	48	52	55	58	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		56		42	45	50	53	56	41	44	47	52	55	0.98	0.98	0.94	0.98	0.98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0.88	0.87	0.86	0.88	0.89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0.99	0.98	0.97	0.98	1.00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		40		25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0.80	0.81	0.80	0.77	0.75

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0.95	0.96	0.90	0.87	0.87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tlogowungu sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tlogowungu sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TLOGOWUNGU
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dml Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	NA	84.085	92.746	118.348	NA	NA	NA	133.947	166.163	NA	NA	99,56	99,08	98.99		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	NA	NA	39.500	57.515	27.500	NA	NA	NA	104.660	61.660	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	NA	10.200	15.400	8.450	NA	NA	NA	8.750	10.000	NA	NA	100	100	100		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	0	12.379	NA	NA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	6.020	7.000	6.180	NA	NA	NA	13.200	8.385	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	NA	7.950	7.950	1.881	NA	NA	NA	4.000	1.080	NA	NA	100	100	100		
Program Penataan Administrasi	NA	NA	81.460	76.420	55.728	NA	NA	NA	55.900	39.000	NA	NA	100	100	100		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kependudukan																	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	NA	NA	7.020	9.845	18.000	NA	NA	NA	13.176	0	NA	NA	100	100	100		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	NA	NA	0	18.000	18.835	NA	NA	NA	0	18.000	NA	NA	NA	100	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA	26.000	15.500	12.420	NA	NA	NA	12.034	11.530	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	NA	NA	4.200	7.500	7.500	NA	NA	NA	11.410	11.030	NA	NA	100	100	100		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	13.637	13.637	13.392	NA	NA	NA	15.000	10.400	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	NA	NA	40.000	15.600	28.770	NA	NA	NA	13.905	880	NA	NA	100	100	100		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Tlogowungu merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tlogowungu kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.